

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2018**



**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dapat terselesaikan.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu unit kerja Eselon II sesuai dengan Inpres RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengharapkan kiranya laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pencapaian tujuan yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Palembang, Januari 2019**  
**Kepala Perwakilan BKKBN**  
**Provinsi Sumatera Selatan,**



**Drs. Waspi**  
**NIP. 19591011 199203 1 001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Arah kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mengacu pada upaya Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama Cita ke-3, yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan", Cita ke-5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia" serta cita ke-8 yaitu "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa". Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yang tercermin pada Dimensi Pembangunan, dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Indonesia dari Pinggiran serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diamanatkan bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga Sejahtera namun juga menyangkut masalah Pembangunan Kependudukan. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Tujuan:

Terlaksananya Program KKBPK di Sumatera Selatan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sasaran:

1. Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun) 2,31;
2. Angka Prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) 65,6;
3. Menurunkan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 10,26;
4. Advokasi dan KIE :
  - a. % PUS memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern = 31%;
  - b. Pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan = 46.

Untuk mencapai sasaran diatas, maka perlu langkah-langkah strategi pemecahan masalahnya, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta keterpaduan dengan komponen, Mitra kerja, OPD KB di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terus menerus;
2. Meningkatkan penyerasian dan strategi pembangunan program KKBPK dengan lintas sektor dan komponen serta daerah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam upaya mewujudkan budaya kerja CETAK TEGAS dengan pemberian tugas dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
4. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Penggunaan data dan informasi yang akurat;
6. Peran Auditor dalam pelaksanaan Program KKBPK.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Isu Strategis .....	5
C. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang .....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis KKBPK 2015-2019 .....	9
1. Visi .....	10
2. Misi .....	10
3. Tujuan .....	11
4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) .....	11
B. Rencana Kerja Tahun 2018 .....	16
1. Sasaran .....	16
2. Program dan Kegiatan .....	17
C. Perjanjian Kontrak Kinerja .....	20
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 .....</b>	<b>22</b>
A. Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
B. Akuntabilitas Keuangan .....	30
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 .....	12
Tabel 1.2. Kontrak Kinerja Tahun 2018.....	21
Tabel 1.3. Capaian atas Kontrak Kinerja Tahun 2018 .....	29
Tabel 1.4. Realisasi Anggaran per Output Tahun 2018.....	32
Tabel 1.5. DAK Sub Bidang KB Tahun 2017 & 2018.....	34
Tabel 1.6. Realisasi DAK Sub Bidang KB Tahun 2018 .....	35
Tabel 1.7. Realisasi Dana BOKB Tahun 2018 .....	37

## LAMPIRAN

1. Tabel Kontrak Kinerja Provinsi tahun 2018.
2. Tabel Pencapaian PB, PA dan Pembangunan Keluarga Terhadap PPM Tahun 2018.
3. Rencana Strategis Tahun 2018.
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.
5. Laporan Kinerja Anggaran (*smart*) tahun 2018.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Arah kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mengacu pada upaya Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama Cita ke-3, yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan", Cita ke-5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia" serta cita ke-8 yaitu "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa". Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yang tercermin pada Dimensi Pembangunan, dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Indonesia dari Pinggiran serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diamanatkan bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga Sejahtera namun juga menyangkut masalah Pembangunan Kependudukan. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian kemudian ditindaklanjuti dengan



Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, Tugas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalah :

1. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
2. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
4. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
5. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan merupakan Provinsi Tipe A yang terdiri dari:

**1. Bidang Sekretariat;**

Melaksanakan koordinasi kegiatan, pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, dengan membawahi 5 Subbag yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Umum dan Humas;
- c. Subbagian Keuangan dan BMN;
- d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
- e. Subbagian Administrasi Pengawasan.

**2. Bidang Pengendalian Penduduk;**

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, dengan membawahi 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Analisa Dampak Kependudukan;
- b. Sub Bidang Penyusunan Parameter Kependudukan;
- c. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan.

**3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;**

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dengan membawahi 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta;
- b. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus;
- c. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

**4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;**

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dengan membawahi 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Bina Keluarga Balita, anak dan Ketahanan Keluarga Lansia;
- b. Sub bidang Bina Ketahanan Remaja;
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

**5. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN);**

Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, dengan membawahi 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Advokasi dan KIE;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi;
- c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan.

**6. Bidang Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian.**

Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dengan membawahi 3 Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Tata Operasional;
- b. Sub Bidang Program dan Kerjasama;
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi.

Sebagai wujud bahwa tugas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Provinsi, oleh karena itu menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala BKKBN dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. ISU STRATEGIS**

1. Masih tingginya LPP (1,4 %);
2. Masih tingginya TFR akibat masih tingginya perkawinan muda (2,31%);
3. Rendahnya pemakaian alkon MKJP (15,30 %);
4. Jumlah unmetneed masih tinggi (11,8 %);
5. Peran institusi masyarakat belum optimal dalam Program Pembangunan Keluarga;
6. Kuantitas dan kualitas Bina Keluarga Belum Optimal;
7. Rasio jumlah PKB berbanding jumlah desa/kelurahan belum ideal;
8. Kuantitas data dan informasi masih rendah.

## **C. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN**

Hasil pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2017, beberapa hal yang masih perlu kita perhatikan dari 14 indikator Kontrak Kinerja Program KKBP Tahun 2017, yang perlu ditingkatkan baik Advokasi KIE tentang Peningkatan Pengetahuan tentang Kependudukan (isu kependudukan, KB dan Pengetahuan tentang metode alat kontrasepsi).

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang akan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dan strategi dan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

### **1. Kekuatan**

Kekuatan diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut:

1. Reputasi dan pengalaman BKKBN dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB;
2. Keberadaan pusat-pusat pelatihan dan penelitian Pembangunan Kependudukan dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja;

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal;
4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah skala nasional dan provinsi, serta non pemerintah;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revolusi Mental "Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong" dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kab/Kota;
6. PLKB/PKB yang telah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
7. Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tingkat Kabupaten/Kota.

Berbagai kekuatan tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam merevitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan lainnya.

## **2. Kelemahan**

Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga:

1. Di tingkat Kabupaten/Kota mutasi dan pengalihan tugas dari Petugas Lapangan KB ke petugas sektoral yang baru sesuai dengan bentuk lembaga yang ada di daerah yang bersangkutan, sehingga jumlah PLKB/PKB dilapangan banyak berkurang, juga di tingkat staf juga terjadi penurunan;
2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan dalam pengelolaan Program KKBPK di masyarakat masih belum memadai;
3. Fasilitasi dan mekanisme operasional pembinaan dalam pelaksanaan program KKBPK dari provinsi ke kabupaten/kota hingga lini lapangan belum optimal;
4. Terbatasnya dukungan APBD dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kab/Kota;
5. Anggaran Program KKBPK yang berasal dari APBN belum secara optimal menyentuh seluruh kegiatan Program KKBPK sampai dengan tingkat lini

lapangan dan belum adanya kepastian regulasi Pengelolaan Anggaran dari Provinsi sampai dengan di Kabupaten/Kota;

6. Masih rendahnya kualitas data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data basis dalam mengalokasikan rancangan program dan anggaran;
7. Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Belum semua Pemerintah Kab/Kota memasukkan Program KKBPK dalam RPJMD;
9. Belum dimanfaatkan Sarana Pra sarana yang bersumber dari DAK Sub Bidang KB.

### **3. Tantangan**

Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah:

1. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia remaja, serta pengaruh media yang mendorong menurunnya rata-rata usia kawin bagi wanita. Hal ini akan mendorong meningkatnya angka kelahiran dan angka kematian ibu;
2. Meningkatnya keinginan pada keluarga muda memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang, sebagai bentuk nilai baru bagi keluarga muda;
3. Masih terjadi nikah usia remaja di wilayah pelosok;
4. Masih kurangnya penyeberluasan informasi tentang Program Remaja terutama di Kampung KB;
5. Masih kurangnya penyebarluasan akses informasi/konseling bagi remaja tentang pengetahuan program KKBPK;
6. Terdapat kebijakan penghematan Tahun Anggaran 2017 yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan setiap komponen;
7. Masih kurangnya koordinasi antara Bappeda dan Badan Keuangan Daerah bersama dengan OPD KB kab/kota dalam pemanfaatan DAK;
8. Semakin meningkatnya keinginan dan kesadaran peserta KB akan kualitas pelayanan yang lebih baik.

#### 4. Peluang

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PLKB/PKB;
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat pusat dan kabupaten/kota;
5. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Program KB dan KS dengan masuknya dalam RPJMD 2013-2018;
6. Komitmen mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pembangunan KKBPK Nasional sangat tinggi;
7. Program Kampung KB yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya;
8. Tersedianya alokasi DAK fisik dan Bantuan Operasional KB (BOKB) dalam DAK Kesehatan pada DAK sub bidang KB sebagai pendukung peningkatan program KB di kabupaten dan kota.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka untuk mendukung rencana strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang kita harapkan selama kurun waktu tahun 2018, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana Strategis mengandung program dengan menghasilkan outcome dan output tertentu dalam upaya mencapai Visi dan Misi, Tujuan/Sasaran yang diinginkan yang akan dicapai.

#### **A. RENCANA STRATEGIS KKBPK 2015 – 2019**

Renstra BKKBN 2015 – 2019 berisi tentang sasaran, kebijakan strategi program serta kegiatan – kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk (jumlah, struktur dan komposisi penduduk dan persebaran penduduk)
2. Berkaitan dengan kualitas penduduk (status kesehatan, angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan)
3. Mobilitas Penduduk, tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Data dan Informasi penduduk
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Dalam rangka memperkuat implementasi program KKBPK, terutama yang meliputi ke 5 (lima) aspek tersebut, perlu penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang harus bermuara pada Visi dan Misi pembangunan 2015 – 2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.



## 1. Visi

Visi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah menjadi ” **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**”. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam RPJPN tahun 2010 – 2025 yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda prioritas No. 5 di dalam Nawa Cita tersebut sebagai penjabaran Visi BKKBN, mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 3) tahun 2015-2019.

Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan Sumatera Selatan yaitu mempertahankan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas di Kabupaten/Kota yang ditandai dengan angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Sumatera Selatan adalah Mengarusutamakan Pembangunan **dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera**. Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; pengendalian penduduk dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

### **3. Tujuan**

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, maka tujuan yang harus dicapai adalah:

- a) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku bagi PUS, WUS, dan remaja yang komprehensif tentang kependudukan, KB-KR, dan pembangunan Keluarga.
- b) Menurunnya LPP, TFR dan ASFR 15-19 tahun.
- c) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi dan menurunnya unmet need.
- d) Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antar wilayah, dan antar tingkat sosial ekonomi.
- e) Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- f) Meningkatnya median usia kawin pertama.
- g) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orangtua mengenai peran dan fungsi keluarga.
- h) Tersedianya dan harmonisnya kebijakan tentang kependudukan dan KB.
- i) Menguatnya kapasitas kelembagaan KB dipusat dan daerah; dan
- j) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat guna dan waktu.

### **4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Berdasarkan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan IKK Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Tabel terlampir.

**Tabel 1.1. Indikator Kinerja Kegiatan**

No	OUTPUT DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019
	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					
	Terlaksananya Program KKBPk diseluruh tingkatan Wilayah	Jumlah cakupan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi (50% dari jumlah kab/kota)	1 Provinsi (70% dari jumlah kab/kota)	1 Provinsi (75% dari jumlah kab/kota)	1 Provinsi (85% dari jumlah kab/kota)	1 Provinsi (100% dari jumlah kab/kota)
		Cakupan pembinaan kesertaan ber KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/kota)
		Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	1 Prov dan 17 Kab/Kota	1 Prov dan 17 Kab/Kota	1 Prov dan 17 Kab/Kota	1 Prov dan 17 Kab/Kota	1 Prov dan 17 Kab/Kota
		Persentase Stakeholder/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE Program KKBPk	60%	60%	60%	70%	80%
		Persentase Petugas Lini Lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat dukungan Operasional Program KKBPk	100	100	100	100	100
		Jumlah Wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembagunan KKB di seluruh tingkatan wilayah	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota

		Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di provinsi	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga , RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga , RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga , RR)
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam Pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100	100	100	100	100
		Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12
		Jumlah penyelenggaraan manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	12	12	12	12	12
	Terwujudnya Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di Provinsi	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Provinsi	17	17	17	17	17
	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Jumlah SDM provinsi (SDM aparatur dan tenaga fungsional, termasuk fungsional Penyuluh Keluarga Berencana-PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	97 pegawai dan 491 fungsional penyuluh	97 pegawai dan 491 fungsional penyuluh	97 pegawai dan 491 fungsional penyuluh	97 pegawai dan 491 fungsional penyuluh	97 pegawai dan 491 fungsional penyuluh
		Jumlah hasil - hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov	3 dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov	3 dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov	3 dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov	3 dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov

## 1. SASARAN STRATEGI dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

### a. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar tidak berkualitas dapat menjadi beban pembangunan. Untuk menjaga penduduk yang banyak ini dapat menjadi modal pembangunan maka penduduk Indonesia harus disiapkan menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, agar mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang holistik, dimana upaya-upaya dimaksud bertujuan untuk mewujudkan ***Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas***. Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya untuk menurunkan tingkat kelahiran, peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga saja. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan program KB dan Pembangunan Keluarga mengalami perkembangan khususnya program Kependudukan. Pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan melibatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek program.

Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat perbedaan suku, budaya dan adat istiadat serta letak geografis yang kurang menguntungkan bahkan beberapa wilayah dengan kategori tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Pelaksanaan pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, erat kaitannya dengan upaya peningkatan angka prevalensi ber-KB *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan penurunan angka kelahiran atau *Total Fertility Rate* (TFR). Namun, untuk mencapai tujuan program KKBPK, peran kelembagaan sangatlah menentukan, apalagi di era otonomi daerah yang keberadaan OPD KB sangat bervariasi, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah setempat. Begitu pula dengan sarana dan prasarana serta komponen-komponen yang mendukungnya seperti petugas lapangan yang

semakin berkurang dari tahun ketahun, APBD yang belum memadai serta ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun **sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun);
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun);

Sasaran Renstra 2015 – 2019 seperti yang tertuang dalam Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 – 2023 sasaran lima tahun kedua (2015 – 2020) adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,17 persen, TFR sebesar 2,3 persen dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 20,80 per 1000 kelahiran. Disamping sasaran tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam RPJMD 2013 – 2019 yaitu “Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dengan strategi peningkatan jumlah mutu layanan KB (tujuan utama a. **Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**), dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (tujuan utama c. **Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**).

## **2. Indikator Kinerja Kegiatan**

- a. Jumlah cakupan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah;
- b. Cakupan pembinaan kesertaan ber KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah;

- c. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah;
- d. Persentase Stakeholder/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE Program KKBPK;
- e. Persentase Petugas Lini Lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat dukungan Operasional Program KKBPK;
- f. Jumlah Wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembagunan KKB di seluruh tingkatan wilayah;
- g. Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di provinsi;
- h. Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi);
- i. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- j. Jumlah penyelenggaraan manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala);
- k. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Provinsi;
- l. Jumlah SDM provinsi (SDM aparatur dan tenaga fungsional, termasuk fungsional Penyuluh Keluarga Berencana-PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- m. Jumlah hasil - hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan;

## **B. RENCANA KERJA TAHUN 2018**

### **a. Sasaran**

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019 antara lain :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15 – 49 tahun) sebesar 2,31
2. Persentase pemakaian alat kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 61,1%
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) sebesar 10,14%
4. Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP sebesar 22,30
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi (%) sebesar 25,0

## **b. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga di daerah, khususnya Sumatera Selatan dilakukan melalui Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana yang mempunyai kegiatan strategis sebagai berikut :

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk :
  - a. Pemanfaatan Data Profil (Parameter dan Proyeksi) Program KKBPK Sebagai Input Perumusan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 9 Kabupaten/Kota
  - b. Peningkatan Kompetensi dalam pemetaan perkembangan program KKBPK melalui DEVINFO sebanyak 17 Kabupaten/Kota
  - c. Inventaris Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi sebanyak 1 Kajian
  - d. Pengembangan Model Solusi Pengendalian Dampak Kependudukan di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Model
  - e. Implementasi Pendidikan Kependudukan Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebanyak 20 Kelompok KKN
  - f. Pembentukan dan Pembinaan Pojok Kependudukan Tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 1 Provinsi
  - g. Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama bersama Mitra Kerja sebanyak 6 Frekuensi Kegiatan
  - h. Pendampingan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebanyak 2 kegiatan
  
2. Meningkatkan kesertaan dan pembinaan ber KB
  - a. Penggerakan dan pementapan kesertaan ber-KB MKJP :
    - 1) Penggerakan pelayanan KB MOP
    - 2) Penggerakan pelayanan KB MOW
    - 3) Penggerakan Pelayanan KB IUD
    - 4) Penggerakan Pelayanan KB Implant



- b. Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan Mitra Terkait sebanyak 2 Kabupaten DTPK
  - c. Pelayanan KB Bergerak (Mobile) di Wilayah Miskin Perkotaan dengan Mitra Terkait sebanyak 4 Kota (Wilayah Miskin Perkotaan)
  - d. Fasilitasi Kegiatan Bidang KB dan KR bersama Kodim sebanyak 7 Kodim
  - e. Fasilitasi Kegiatan Bidang KB dan KR bersama Polri (Polda) sebanyak 1 Polda
  - f. Pencetakan dan Distribusi Kebijakan Kespro sebanyak 5.226 Buku
  - g. Pencetakan dan Distribusi Materi Promosi dan Konseling Kespro Sebanyak 8.710 Buku
  - h. Evaluasi dan Pendayagunaan Pasca Pelatihan Pre Service Training sebanyak 1 Universitas
  - i. Promosi Pelayanan KB dan KR berkualitas dalam era JKN bersama Mitra Kerja sebanyak 6 Frekuensi Kegiatan
3. Meningkatkan pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- a. Sosialisasi Pembangunan Keluarga bersama mitra kerja sebanyak 6 frekuensi kegiatan
  - b. Pengadaan dan distribusi materi dan media Promosi BKBA serta 1000 hari pertama kehidupan sebanyak 17 kabupaten/kota
  - c. Sosialisasi BKB dan 1000 hari pertama kehidupan sebanyak 1 provinsi
  - d. Pembinaan Kelompok BKB HI sebanyak 355 kelompok BKB HI
  - e. Pembinaan PIK R sebanyak 86 Kelompok PIK R
  - f. Pembinaan BKR sebanyak 98 Kelompok BKR
  - g. Penyediaan dan distribusi materi BKL dan PPKS sebanyak 43 eksemplar
  - h. Perbanyak Materi Pengelolaan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebanyak 17 eksemplar
  - i. Dukungan Pembinaan Kelompok BKL sebanyak 26 kelompok BKL
  - j. Dukungan Pengembangan PPKS pada Jaringan Perguruan Tinggi sebanyak 1 PT
  - k. Pembinaan Kelompok UPPKS sebanyak 71 kelompok UPPKS

4. Meningkatkan Pembinaan advokasi dan KIE program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga :

- a. Fasilitas peningkatan gerak Mupen kabupaten/kota ke kecamatan dan desa/kelurahan sebanyak 6 kegiatan/gerak
- b. Pertemuan KKBPK tingkat kecamatan (Rakor kec.) sebanyak 231 kecamatan
- c. Pertemuan KKBPK tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Des) sebanyak 3.236 desa/kelurahan
- d. Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sebanyak 17 Kabupaten/Kota
- e. Dukungan Operasional Pendamping Program KKBPK oleh Mitra Kerja sebanyak 17 kab/kota
- f. Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kampung KB di Provinsi sebanyak 1 Provinsi
- g. Jambore (Orientasi) GESIT bagi PPKBD/ Sub PPKBD sebanyak 17 Kabupaten/Kota
- h. Sosialisasi dan Pengembangan Program Lini Lapangan di Kampung KB bersama Mitra Kerja sebanyak 6 Frekuensi
- i. Monev Terpadu SIGA Tk. Provinsi sebanyak 9 Kabupaten/kota
- j. Pertemuan lengkap IMP tk. Desa/kelurahan (pertemuan PPKBD/ Sub PPKBD Tk. Desa)
- k. Dukungan Operasional Program KKBPK bagi PKB/PLKB
- l. Fasilitasi Pencanangan dan Pembinaan Kampung KB di Desa Sangat Tertinggal sebanyak 217 Desa Tertinggal
- m. Pengembangan Centre of Excellent Pengelolaan Kampung KB sebanyak 1 Kampung KB

5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan SDM :

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 2 orang
- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 2 orang
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 5 orang
- d. Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK bagi PKB (PNS) sebanyak 30 orang

- e. Diklat Penjenjangan Fungsional PKB Terampil ke Ahli sebanyak 15 orang
- f. Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS sebanyak 30 orang
- g. Diklat Teknis Penyegaran Program KKBPK Bagi PLKB/PKB (refreshing) sebanyak 98 orang
- h. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK Bagi PKB/PLKB sebanyak 98 orang
- i. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural Bagi PKB/PLKB sebanyak 98 orang
- j. Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK Bagi Tim KB Desa Sebanyak 18 orang
- k. Pelatihan Konseling berimbang sebanyak 115
- l. Pelatihan Teknis Toma, Toga, Toda dan mitra kerja sebanyak 105 orang
- m. Diklat Management of training (MOT) sebanyak 1 orang

6. Meningkatkan dan memanfaatkan hasil – hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan PK (KKBPK)

- a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan, KB dan KS yang dimanfaatkan di provinsi
- b. Jumlah model – model pengembangan Program Kependudukan, KB, KS

7. Dukungan Manajemen Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) :

- i. Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- ii. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- iii. Jumlah dokumen perencanaan program KKB di Provinsi;
- iv. Peningkatan kualitas kompetensi pegawai;
- v. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan laporan barang milik negara ;.
- vi. Jumlah sarana dan pra sarana perkantoran;
  - ❖ Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
  - ❖ Pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran
  - ❖ Rehab Gedung kantor/gudang kantor/balai diklat

- vii. Meningkatkan pelaksanaan NSPK;
- viii. Peningkatan pengawasan pelaksanaan program KKBPK;
- ix. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

### C. PERJANJIAN KONTRAK KINERJA

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pencapaian program KKBPK 2018, antara lain membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN Provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dengan menandatangani Kontrak Kinerja Provinsi yang terdiri dari 21 indikator sebagai sasaran Kontrak Kinerja BKKBN Provinsi Tahun 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Kontrak Kinerja Perwakilan BKKBN  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018**

No	INDIKATOR KONTRAK KINERJA	SASARAN KKP 2018
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-19 tahun)	2.22
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66.70
3.	Persentase Penurunan Angka Keberlangsungan Pemakaian (Tingkat Putus Pakai) Kontrasepsi	25.00
4.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	7.00
5.	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	16.88
6.	Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	23,955
7.	Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 tahun)	51
8.	Persentase Kehamilan yang tidak di inginkan dari PUS (15-49)	9.45
9.	Median Usia Kawin Pertama Wanita	20.80

10.	Persentase pengetahuan keluarga tentang kependudukan (isu kependudukan)	52.20
11.	Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	47.80
12.	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	20.0
13.	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	55.1
14.	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA)	217
15.	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki Baduta terpapar 1000 Hari	25.00
16.	Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	11.66
17.	Persentase Capaian Kinerja	2 (Skor: 2,7)
18.	Persentase pencapaian Output	≥ 90
19.	Persentase Penyerapan Anggaran	≥ 95
20.	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	≥ 95
21		100

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

##### **1. Pemanfaatan Indikator Kinerja Utama dan Pengukuran Kinerja Untuk Pengendalian dan Pemantauan Kinerja**

Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan telah memanfaatkan indikator kinerja utama (IKU) dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. IKU merupakan kontrak kinerja antara Kepala BKKBN Pusat dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Pengendalian dan pemantauan kinerja dilakukan melalui 3 tahap yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Evaluasi kinerja bulanan dilakukan melalui rapat pengendalian program dan anggaran (Radalgram), yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Radalgram dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, yang diikuti oleh pejabat administratif, pengawas, fungsional. Hal itu menunjukkan komitmen pimpinan dan anggota organisasi untuk mengendalikan pencapaian kinerja program dan organisasi. Dalam Radalgram selain dibahas permasalahan-permasalahan program juga dibicarakan strategi dan upaya pemecahan masalahnya serta rencana tindak lanjutnya.

Pengendalian dan pemantauan kinerja semesteran (6 bulan) dilakukan melalui Review atau telaah Pembangunan KKB, yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional dilingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, SKPD KB Kabupaten/Kota, serta mitra kerja terkait lainnya. Dalam evaluasi semesteran juga biasanya dihadirkan narasumber dari BKKBN Pusat. Dalam pertemuan Review Pembangunan KKB tersebut dievaluasi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran enam bulan terakhir, yang secara mendalam dianalisis dengan membandingkan pencapaian dalam periode yang sama tahun sebelumnya, serta perbandingan pencapaian antar kabupaten/kota. Selain itu, juga dibicarakan mengenai rencana strategi operasional program KKB enam bulan ke depan serta kebijakan, strategi, dan sasaran program tahun berikutnya.

Selanjutnya pengendalian dan pemantauan kinerja tahunan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan KKB yang dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, para *stakeholder* dan mitra kerja terkait. Dalam Rakorda dibahas evaluasi tahunan, arah kebijakan dan strategi tahun berjalan serta penetapan kinerja melalui penandatanganan kontrak kinerja provinsi dan SKPD KB Kabupaten/Kota.

## **2. Mekanisme pengumpulan data pencapaian kinerja**

Terdapat berbagai sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja program KKBPK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Sumber data tersebut adalah sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPK, SKAP 2018, dan SDKI 2017.

## **3. Hasil Pelaksanaan Program KKBPK**

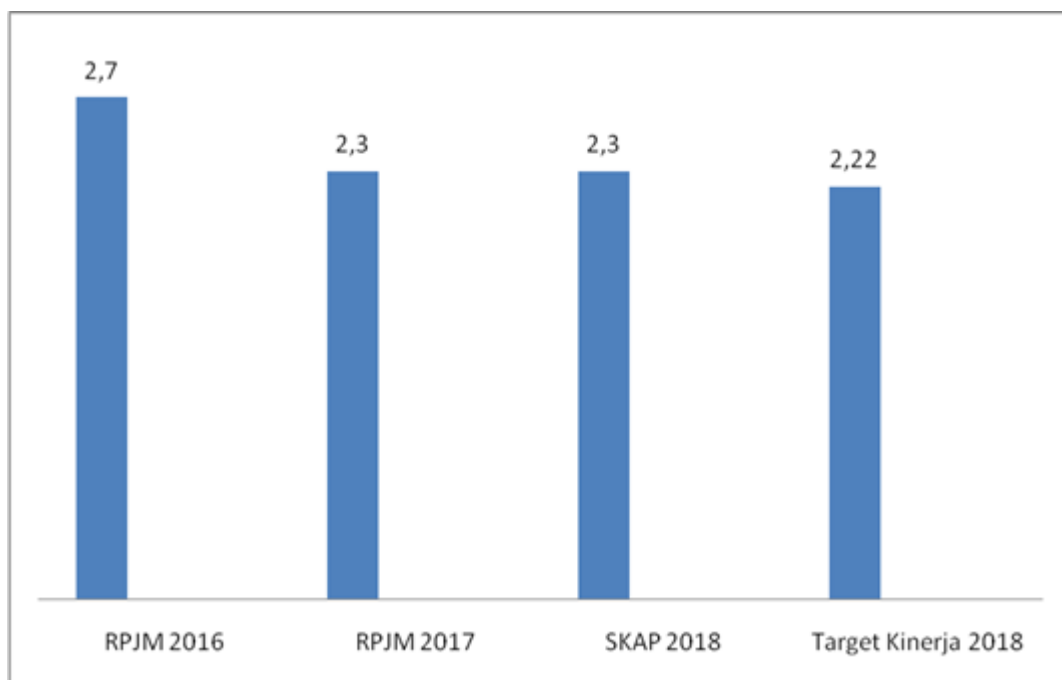
Dengan berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2018 untuk mendukung keberhasilan pencapaian program, maka dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian program KKBPK selama kurun waktu tersebut dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap indikator atau variabel yang terdapat pada kontrak kinerja antara Kepala BKKBN Pusat dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

### **a. Total Fertility Rate (TFR)**

Berdasarkan hasil SKAP tahun 2018, TFR Sumatera Selatan berada pada angka 2,3. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target kontrak kinerja tahun 2018 yaitu 2,2 Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 sebesar 2,2, maka TFR Sumatera Selatan saat ini masih 0,1 lebih tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi TFR. Kingsley Davis dan Judith Blake menyebutkan terdapat 11 indikator yang menentukan fertilitas, antara lain Umur memulai hubungan kelamin dan pemakaian kontrasepsi. Di Sumatera Selatan umur perkawinan perempuan di bawah 18 tahun masih cukup tinggi yang tentu saja akan

mempengaruhi panjangnya usia reproduksi, sementara pemakaian kontrasepsi juga masih didominasi oleh pemakaian kontrasepsi non MKJP.

Dengan sisa waktu satu tahun lagi, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh agar target penurunan TFR pada akhir tahun 2019 dapat tercapai. **Gambar 3.1** menunjukkan perkembangan TFR pada tiga tahun terakhir menurut hasil SKAP.



Gambar 3.1 Perkembangan TFR Sumatera Selatan berdasarkan SKAP 2016-2018

Upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan TFR di Sumatera Selatan, antara lain:

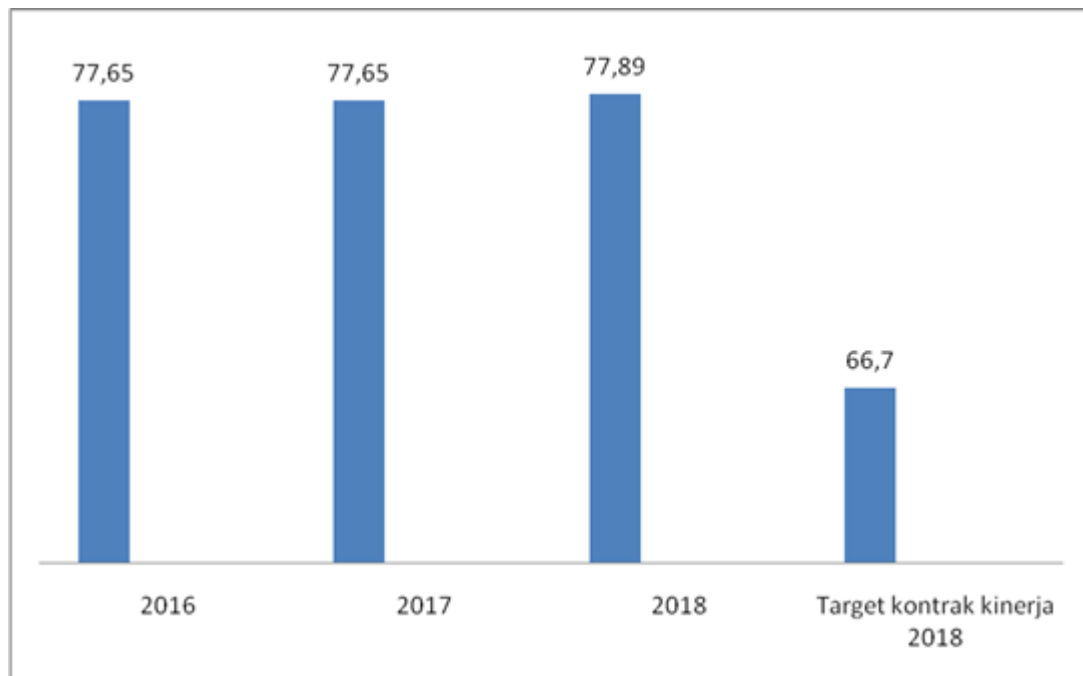
- 1) Memaksimalkan Program Generasi Berencana dalam upaya untuk menurunkan angka perkawinan muda, antara lain dengan memaksimalkan peran PIK Remaja baik yang berbasis sekolah, kampus, pondok pesantren maupun komunitas (remaja mesjid dan Karang Taruna);
- 2) KIE Program Kesehatan reproduksi Remaja terutama untuk mencegah meningkatnya perilaku seks yang tidak bertanggung jawab yang berdampak pada perkawinan yang belum waktunya;
- 3) Meningkatkan pemakaian kontrasepsi MKJP. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya angka *drop out*.



### b. Tingkat Kesertaan ber KB (CPR)

Bila dilihat persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern, hasil R/R Dallap menunjukkan tidak ada kenaikan yang signifikan dalam penggunaan kontrasepsi. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 77,65 persen pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern, sedangkan tahun 2018 tercatat sebanyak 77,89 persen atau kenaikannya hanya sebesar 0,2 persen. Tingkat kesertaan ber KB di Sumatera Selatan sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BKKBN Pusat dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesertaan ber KB tidak lepas dari cukup tingginya komitmen pemerintah daerah dan seluruh mitra kerja dalam penggarapan Program KB.

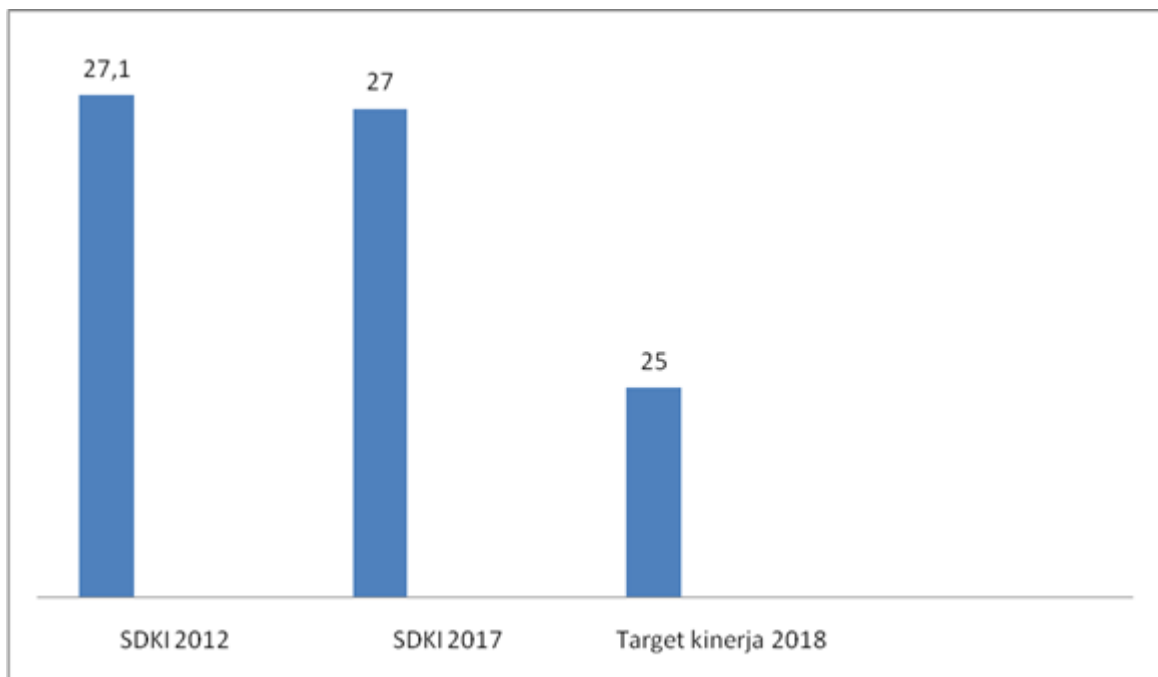


Sumber: Statistik Rutin

Gambar 3.2 Persentase Tingkat Kesertaan ber KB Provinsi Sumsel Tahun 2016 s.d 2018

### c. **Persentase Penurunan angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

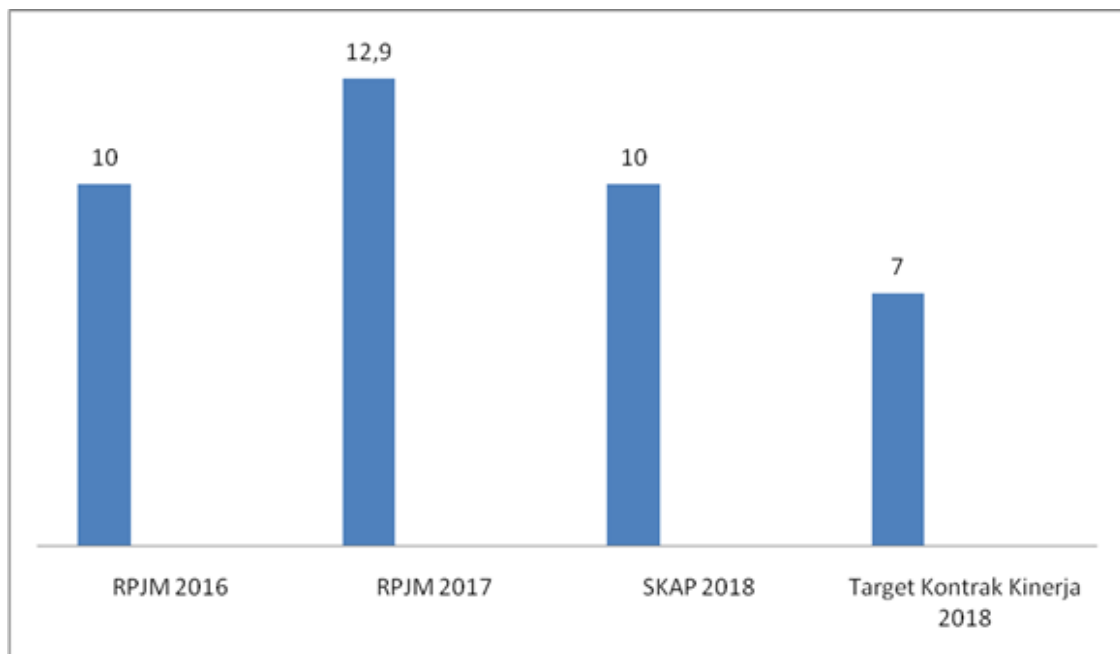
Perbaikan kualitas pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana. Salah satu ukuran dari kualitas pemakaian adalah angka ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi. Alasan putus pakai bisa mencakup kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan terhadap alat/cara KB, efek samping, dan kurang tersedianya alat/cara KB. Tingkat putus pakai yang tinggi, kegagalan alat/cara KB, dan pergantian alat/cara KB bisa mengindikasikan diperlukan perbaikan dalam pemberian konseling tentang pemilihan alat/cara KB, pelayanan lanjutan, dan penyediaan pelayanan yang lebih luas. SDKI tahun 2017 memperlihatkan, angka putus pakai kontrasepsi di Sumatera Selatan berkisar 27 persen, angka hampir sama dengan hasil SDKI 2017 sebesar 27,1. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018, persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 25 persen.



*Gambar 3.3 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Sumatera Selatan*

#### d. Unmet Need

Upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB menjangkau pula kelompok yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi. Berdasarkan hasil SKAP tahun 2018, persentase jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi ditunda dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi angkanya sebesar 10 persen atau 2,9 persen lebih rendah/tinggi dari hasil RPJM 2017 sebesar 12,9 persen. Walaupun terjadi penurunan persentase *unmet need*, namun angka tersebut masih jauh apabila dibandingkan target RPJM sebesar 5 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, karena *unmet need* dapat mengakibatkan terjadinya *unwanted pregnancy*. Diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi antara lain peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB sehingga *unmet need* dapat diturunkan paling sedikit 5 persen dalam waktu satu tahun ke depan.



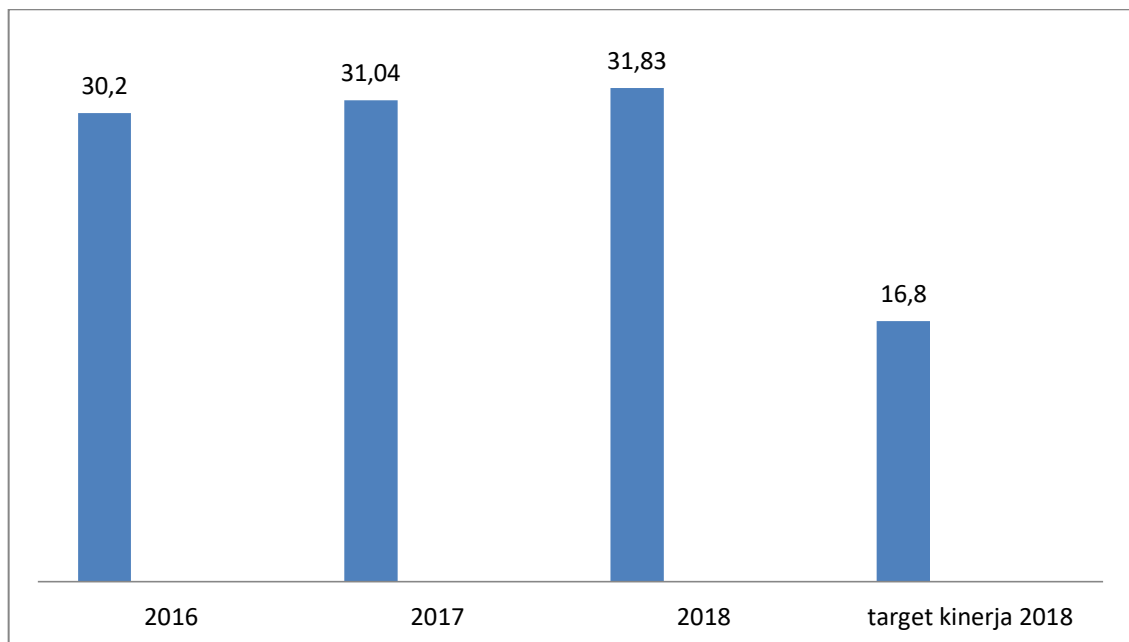
Gambar 3.4 Perkembangan Pencapaian Unmet Need

#### e. Persentase Peserta KB Aktif MKJP

PA MKJP adalah peserta KB yang saat ini sedang menggunakan salah satu metoda kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD, MOW, Implan, dan MOP. Sampai dengan bulan Nopember 2018 persentase peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP sebanyak 31,83 persen, lebih tinggi sedikit bila dibandingkan dengan bulan Desember 2017 yaitu sebanyak 31,04 persen. Bila dibandingkan dengan target kinerja 2018, persentase peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP di

Sumatera Selatan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 16,8 persen. Pemakaian MKJP oleh PUS perlu terus ditingkatkan dikarenakan pemakaian kontrasepsi MKJP ini berpengaruh terhadap penurunan angka TFR. Semakin tinggi pemakaian MKJP akan semakin memudahkan untuk menurunkan TFR. Perlu dibuat strategi khusus untuk dapat meningkatkan pemakaian MKJP. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun tahun berikutnya di Sumatera Selatan untuk meningkatkan pemakaian MKJP, antara lain:

- 1) KIE melalui testimoni yang sudah menggunakan MKJP
- 2) KIE tentang keuntungan menggunakan MKJP dibandingkan non MKJP
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan KB MKJP melalui Tim Penjaga Mutu Pelayanan
- 4) Pelatihan Konseling berimbang bagi PKB/PLKB dan bidan
- 5) Pelatihan CTU bagi Bidan dan dokter



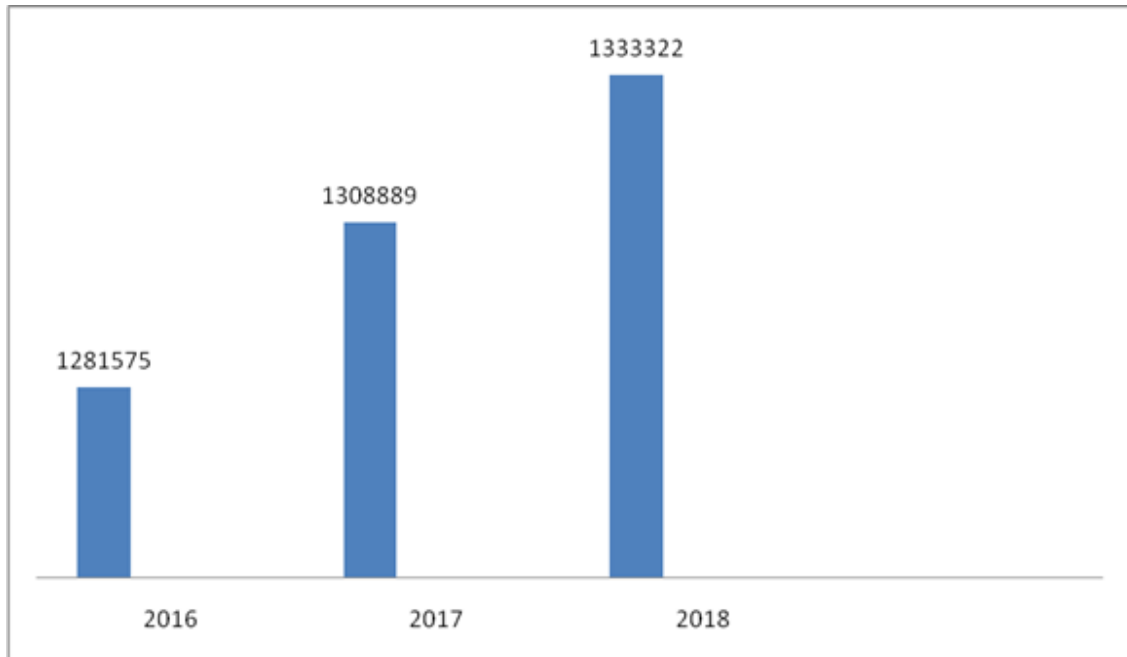
Sumber: R/R dallap

Gambar 3.5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP Sumatera Selatan

#### f. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan

Jumlah peserta KB aktif di Sumatera Selatan pada tahun 2018 berdasarkan R/R Dallap s.d bulan Agustus 2018 berjumlah 1.333.322. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 yang berjumlah 1.308.889 peserta (terjadi penambahan sebanyak 24.433 peserta). Penambahan sebanyak

24.433 peserta KB aktif ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam kinerja tahun 2018 yaitu sebanyak 23.955 peserta. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari peran serta seluruh pengelola dan pelaksana Program KKBPK di berbagai tingkatan. Kondisi ini perlu terus dipelihara agar penurunan TFR dapat dicapai.



Sumber: R/R Dallap

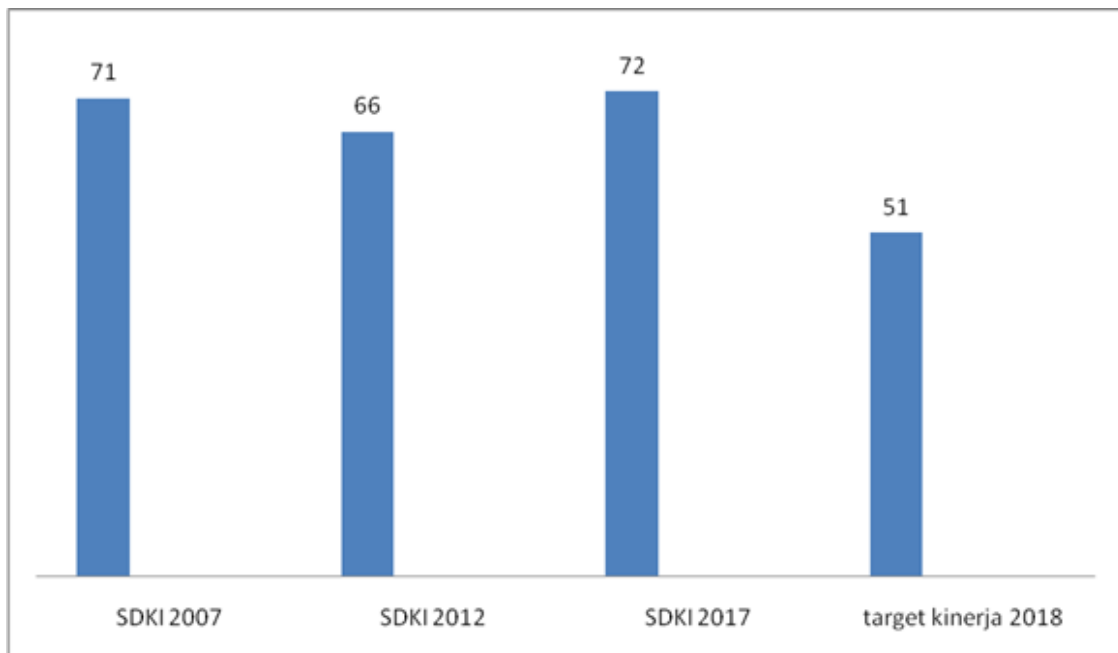
Gambar 3.6 Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan di Sumatera Selatan tahun 2016 s.d 2018

#### **g. Angka Kelahiran Pada Remaja (15-19 tahun)**

Salah satu faktor penyebab masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah angka kelahiran pada remaja (15-19) tahun. Berbagai kajian menyebutkan bahwa ibu yang melahirkan pada umur muda akan mengalami berbagai kesulitan dalam proses melahirkan. Hasil SDKI tahun 2017 menunjukkan angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun) adalah 72 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan SDKI tahun 2012 yaitu 66 per 1000 kepada kelahiran hidup. Angka kelahiran pada remaja di Sumatera Selatan masih tinggi dibandingkan dengan target kinerja 2018 yaitu 51 per 1000 kelahiran hidup.

Untuk menurunkan angka ASFR perlu dilakukan upaya oleh berbagai pihak terutama memberikan wanita untuk akses pada pendidikan dan pekerjaan. Program Generasi Berencana bagi remaja perlu terus digaungkan kepada para remaja dengan memanfaatkan kelompok PIK Remaja baik PIK Remaja basis

sekolah, kampus, pondok pesantren maupun basis komunitas (remaja masjid, Karang taruna dan lain sebagainya) melalui kegiatan-kegiatannya yang ramah remaja.

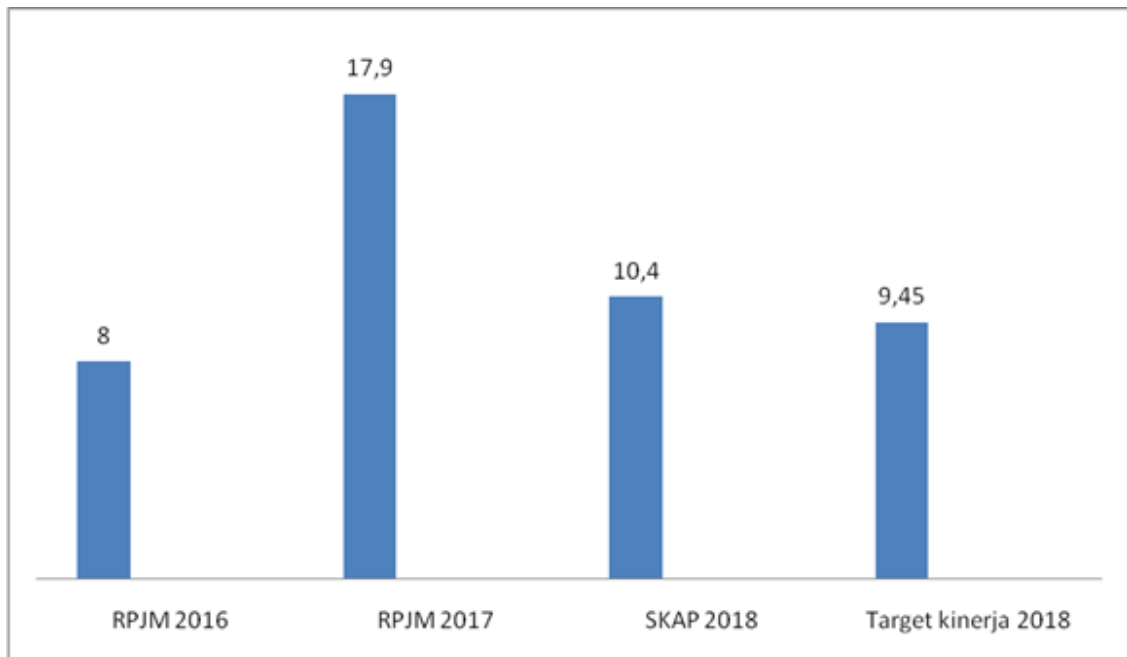


Gambar 3.7 Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 tahun) Prov. Sumsel

#### **h. Persentase kelahiran yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)**

Kejadian kelahiran yang tidak diinginkan akan menimbulkan beban bagi suami dan istri. Beban yang didapat bagi pasangan suami istri tidak hanya berlangsung satu atau dua tahun, tetapi memakan jangka waktu yang panjang. Kondisi ini akan diperparah lagi kalau kondisi PUS tidak siap dari berbagai segi terutama dari sisi ekonomi/kemiskinan. Dalam UU No 52 tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan akhir dari Program KB adalah membentuk SDM yang berkualitas. Syarat untuk dapat menciptakan SDM berkualitas adalah keluarga mempunyai akses gizi, pendidikan dan ekonomi. Untuk itu Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan berjuang keras sekuat tenaga untuk dapat menurunkan angka unmetneed KB, agar kejadian kelahiran yang tidak diinginkan dapat diturunkan. Hasil SKAP tahun 2018 menunjukkan Kehamilan yang tidak diinginkan di Sumatera Selatan adalah 10,4 persen, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan RPJM 2017 sebesar 17,9 persen. Bila dibandingkan dengan target kinerja 2018 yang ditetapkan, persentase kelahiran yang tidak diinginkan dari PUS 15-49 tahun di Sumatera Selatan sebesar 9,45 persen belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang

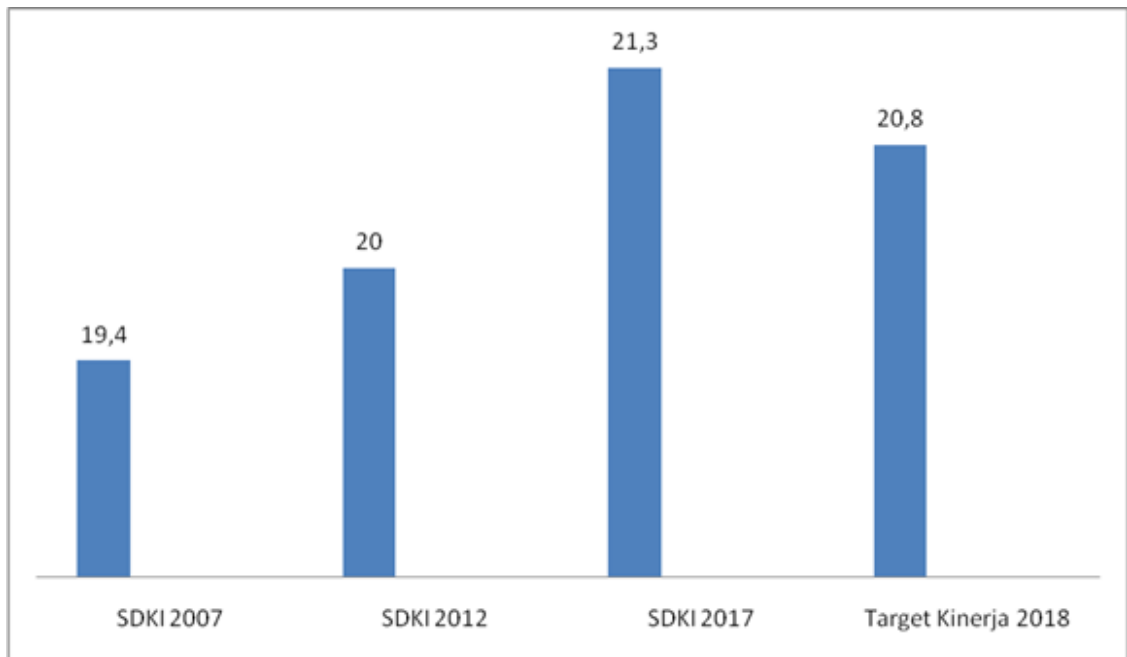
tinggi antara lain peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB sehingga *unmet need* dapat diturunkan.



Gambar 3.8 Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari PUS 15-49 tahun di Sumatera Selatan

#### i. Median Usia Kawin Pertama

Median usia kawin pertama di Sumatera Selatan berdasarkan hasil SDKI 2017 adalah 21,3 tahun. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan SDKI 2012 yaitu 20 tahun. Target kinerja tahun 2018 yang disepakati untuk median usia kawin tahun 2018 adalah 20,8 tahun. Ini berarti bahwa kinerja untuk median usia kawin pertama di Sumatera Selatan telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tentu saja terjadi karena meningkatnya kesadaran wanita terhadap kesehatan reproduksi, yang salah satunya berkat program Genre yang terus menerus digaungkan, serta semakin meningkatkan akses wanita pada pendidikan dan pekerjaan.

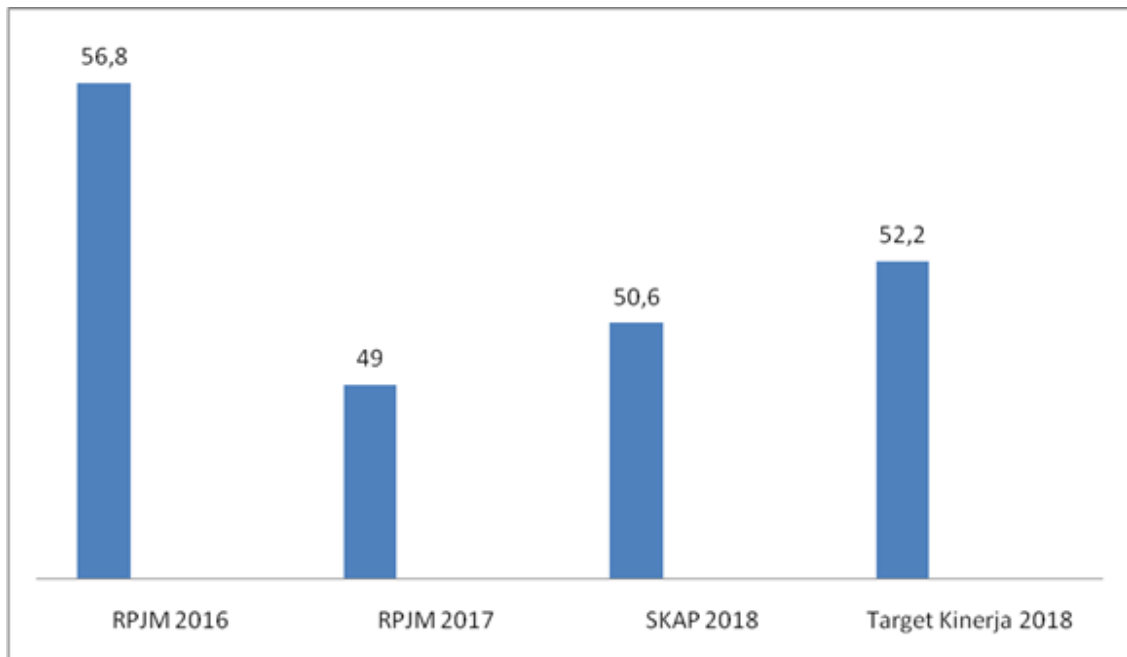


Gambar 3.9 Trend Media Usia Kawin Pertama di Sumatera Selatan

**j. Persentase Pengetahuan Keluarga tentang Isu Kependudukan**

Hasil SKAP 2018 menunjukkan keluarga yang mengetahui isu kependudukan mencapai 50,6 persen. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan dengan survey RPJM 2017 yang mencapai 49 persen. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 yang ditetapkan (52,2 persen) menunjukkan persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan belum mencapai target yang ditetapkan. Pengetahuan tentang isu-isu kependudukan bagi keluarga cukup penting agar keluarga dapat turut berperan dalam pelaksanaan Program pembangunan kependudukan yang dilaksanakan baik menyangkut kuantitas penduduk, kualitas penduduk maupun mobilitas penduduk. Penyebarluasan informasi atau isu-isu kependudukan melalui berbagai media KIE baik cetak, elektronik, luar ruang maupun media sosial dan berbagai momentum perlu terus digaungkan sehingga dampak kependudukan dapat diminimalisir.

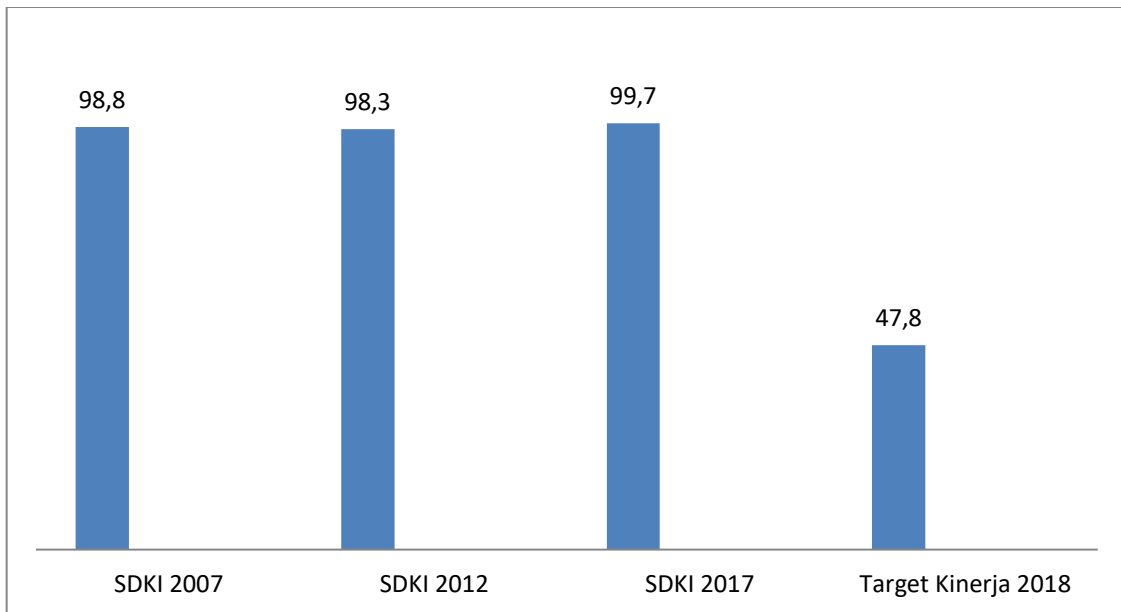




Gambar 3.10 Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan di Sumatera Selatan

**k. Persentase Pengetahuan PUS tentang Alat/Cara KB (Semua Alat/Cara KB)**

Hasil SDKI 2017 menunjukkan pengetahuan PUS tentang alat/cara KB mencapai 99,7 persen. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan dengan survey SDKI 2012 yang mencapai 98,3 persen. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 yang ditetapkan (47,8 persen) menunjukkan persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara KB sudah melampaui target yang ditetapkan. Pengetahuan PUS tentang alat/cara KB cukup penting dalam upaya mendorong PUS untuk mau menggunakan kontrasepsi dalam mengatur kehamilan dan kelahirannya. Tingginya pengetahuan PUS tentang alat/cara KB tidak terlepas dari peran media KIE serta pengelola dan pelaksana Program KKBPK dalam menyampaikan informasi alat/cara KB kepada masyarakat



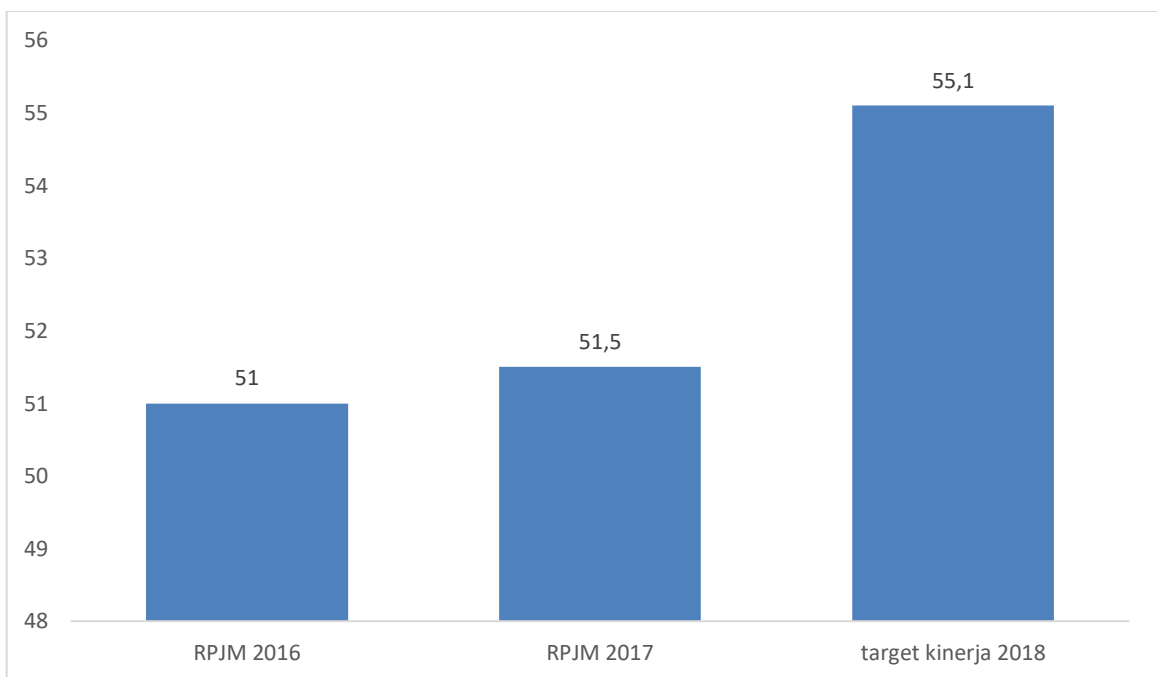
Gambar 3.11 Persentase Pengetahuan PUS tentang Alat/Cara KB (Semua Alat/Cara KB) di Sumatera Selatan

#### I. Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembnagunan berwawasan kependudukan

Untuk mengukur indikator analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembnagunan berwawasan kependudukan diukur dari persentase Rumah Data Kependudukan yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota. Persentase Rumah data Kependudukan yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sampai dengan bulan Desember sudah mencapai 40 % dari total Kampung KB yang sudah dicanangkan/dibentuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja Kabupaten/Kota yang memanfaatkan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembnagunan berwawasan kependudukan sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 persen. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kesadaran tentang pentingnya keberadaan Rumah Data Kependudukan dalam upaya penyediaan data data kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan Program Kampung KB yang sudah terbentuk. Selanjutnya perlu terus dilakukan advokasi dan pembinaan kepada para pengelola Kanmpung KB untuk dapat membentuk Rumah Data Kependudukan.

**m. Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja**

Hasil Survey RPJM tahun 2017 menunjukkan indeks pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Sumatera Selatan sebesar 51,5, angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan RPJM tahun 2016 sebesar 51 persen. Namun bila dibandingkan dengan target kinerja 2018 yang ditetapkan (55,1 persen), indeks pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di Sumatera Selatan belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu perlu kiranya program Genre terus digaungkan kepada para remaja. Kegiatan KIE KRR perlu dilakukan melalui media-media KIE yang ramah remaja. Bioskop bisa menjadi alternative untuk penyebarluasan KIE KRR yang ramah remaja.



**n. Jumlah Kampung KB yang dicanangkan**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali membumikan Program KBPK adalah melalui Program Kampung KB yang telah dimulai sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 Kampung KB yang dicanangkan di Sumatera Selatan berjumlah 186 atau 85,71 persen . Jumlah ini belum memenuhi target kinerja tahun 2018 yang ditetapkan yaitu sebanyak 217 Kampung KB. Beberapa kabupaten/kota yang belum mencanangkan Kampung KB dengan alasan kurang siap karena mepetnya waktu pada tahun 2018 adalah Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang. Mengingat strategisnya Program Kampung KB, untuk tahun tahun mendatang perlu dilakukan perencanaan AJK yang matang dalam pencanangan Kampung KB di Kabupaten/Kota.

**o. Persentase Kampung KB yang Telah Memiliki Kelompok Kerja (POKJA)**

Untuk kelancaran operasional Kampung KB yang maksimal, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Pokja Kampung KB. Melalui POKJA Kampung KB diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB dapat terintegrasi dan terarah dalam upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Target kinerja persentase Kampung KB yang telah memiliki POKJA pada tahun 2018 adalah sebanyak 25 persen. Di Sumatera Selatan Kampung KB yang telah memiliki POKJA baru sekitar 7,5 persen. Jumlah ini masih belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini terjadi dikarenakan masih kurangnya kepedulian dan komitmen pengelola Kampung KB serta masih relatif rendahnya advokasi dari petugas KB (PKB/PLKB) dan SKPD KB kepada pimpinan wilayah baik itu kepala desa/Lurah, camat maupun Bupati/Walikota. Untuk meningkatkan jumlah POKJA Kampung KB perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang kepada para pengelola Kampung KB serta koordinasi dengan SKPD KB kabupaten/kota.

**p. Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki Baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan kejadian stunting adalah melalui kampanye tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan. Tahun 2018 persentase orang tua hebat yang memiliki Baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan mencapai 19,7 persen. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 yang ditetapkan sebanyak 11,6 persen, persentase Orang Tua Hebat yang memiliki Baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan di Sumatera Selatan telah melampaui target yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan stunting di Sumatera Selatan dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti sarasehan, orinetasi, penyuluhan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan kepada remaja, ibu hamil, dan ibu yang memiliki Baduta. Kampanye kegiatan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan bersama sama antara Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan bekerjasama dengan Tim penggerak PKK, Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, PMD, SKPD KB serta pihak-pihak lain yang terkait. Untuk

memaksimalkan pelaksanaan kampanye 1000 hari pertama kehidupan juga dilakukan kegiatan pengembangan media KIE 1000 Hari pertama Kehidupan.

#### **4. Upaya dan Kegiatan Strategis Program KKBPK**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2018 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program KKBPK kepada seluruh stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya program yang dilakukan adalah dengan merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Program KKBPK 2015-2019.

Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program KKB nasional, maka pada setiap awal tahun selalu dilakukan penyegaran kembali komitmen terhadap program KKBPK dari pemerintah daerah, stakeholder, dan mitra kerja program melalui forum Rapat Koordinasi Daerah.

Internal Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan juga mempunyai mekanisme dalam melakukan perencanaan, penggarapan dan pengendalian program KKB melalui berbagai forum: Rakorda, Rapat Telaah/Review Program KKB. Disamping itu untuk menguatkan dalam penggarapan program juga dilakukan rapat-rapat yang bersifat koordinasi antar komponen.

Melalui forum-forum pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi dan desiminasi, kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program serta kegiatan dalam Rencana Strategis Program KKBPK.

Secara eksternal, dilakukan pula upaya-upaya penguatan kembali komitmen dengan para stakeholder dan mitra kerja Perwakilan BKKBN melalui penandatanganan MOU kerjasama dan kemitraan memperkuat pelaksanaan program KKBPK. Penguatan komitmen ini antara lain dilakukan:

- a. Dengan Universitas PGRI untuk Program Penelitian dan Pengembangan;
- b. Dengan RRI Palembang untuk program penyebaran informasi KKBPK;
- c. Dengan BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Selain melalui kemitraan dengan berbagai pihak, pencapaian sasaran kinerja program KKB telah dilakukan berbagai kegiatan strategis di Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

**a. Program Kependudukan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Pakar Advokasi Untuk Kependudukan;
- 2) Pembentukan Tim Fasilitasi Untuk Penyusunan Grand Design Kependudukan Kab/kota;
- 3) Pembentukan Sekolah siaga Kependudukan;
- 4) Pembentukan dan Pembinaan Pojok Kependudukan;
- 5) Penyusunan Profil Parameter Kependudukan;
- 6) Pembentukan Rumah Data Kependudukan;
- 7) Fasilitasi Indikator Kependudukan untuk program RPJMD Pemerintah Daerah;
- 8) Pembuatan Hasil Kajian Dampak Kependudukan;
- 9) Pengembangan Model Solusi Dampak Kependudukan;
- 10) Kuliah Umum Pembangunan Pendidikan Kependudukan;
- 11) Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal;
- 12) Orientasi Pendidikan Kependudukan bagi Kader di Kampung KB (Tingkat Provinsi).

**b. Program KB dan KR**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) CTU pre service bagi mahasiswa Kedokteran UNSRI;
- 2) Pelayanan Papsmear bersama TP PKK;
- 3) Sosialisasi Aplikasi Monika;
- 4) Dukungan dana penggerakkan pelayanan IUD, Implan, MOP dan MOW;
- 5) Peningkatan kualitas penggerakkan pelayanan KBKR di daerah DTPK, wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus;
- 6) Pemberian pelayanan KB sesuai dengan SOP dan Kesehatan Reproduksi pada Faskes KB (Pemerintah dan Swasta);
- 7) Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi;
- 8) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kab/Kota.

**c. Program KS dan PK**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Genre *goes to school*, genre *goes to campus* dan genre *goes Pondok Pesantren*;
- 2) Jambore Ajang kreativitas PIK R/M;
- 3) Pemilihan Duta Genre;
- 4) Sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan bagi mitra kerja;
- 5) Pengembangan PPKS pada jaringan perguruan tinggi.
- 6) Sosialisasi Kelanjutusiaan bagi Kader dan PLKB
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Program POKTAN di Kampung KB
- 8) Pendampingan Sosialisasi Perawatan Jangka Panjang Berbasis Keluarga di Kelompok BKL.
- 9) Orientasi Gerakan Nasional 1000 *Caregiver* Keluarga Lansia
- 10) Orientasi 1000 Hari Pertama Kehidupan tk. Desa

**d. Program Advokasi**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Fasilitasi advokasi Program KKBPK kepada mitra kerja;
- 2) KIE melalui berbagai media KIE;
- 3) Pengembangan *center of excellent* Kampung KB;

- 4) Sosialisasi dan pengembangan program lini lapangan di Kampung KB bersama mitra kerja (DPR RI);
- 5) Penilaian anugrah Kencana Bidang KKBPK bagi mitra kerja tingkat provinsi;
- 6) Pemutakhiran basis data keluarga.

**e. Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan *excellent training*;
- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola program baik provinsi, maupun kabupaten dan kota;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan, KB dan KS yang prioritas dalam rangka menunjang operasional program;
- 4) Mensosialisasikan hasil penelitian melalui berbagai forum seperti desiminasi, buku, *policy brief*;
- 5) Meningkatkan kemitraan dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan penelitian.

**d. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Menetapkan sasaran program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional untuk penyusunan dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan pengelolaan kepegawaian untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel didukung oleh SDM yang professional serta terlaksananya pengelolaan sarana program secara tepat waktu, jumlah, tempat, harga, mutu dan jenis;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan serta sarana dan prasarana perkantoran modern dalam mendukung pelaksanaan Program KKBPK;



- 5) Meningkatkan pelaksanaan pengadaan DAK Bidang KB untuk memperkuat dan membantu penyediaan sarana fisik pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Program KKB di wilayahnya.

**g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) melalui Konsolidasi dalam rangka realisasi rencana aksi penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP, Pembinaan SPIP;
- 2) Pelaksanaan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan audit tujuan tertentu meliputi aspek Program, keuangan dan Perbekalan, serta ketenagaan dan Administrasi Umum.

**A. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

**1. Dukungan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.**

Untuk Tahun Anggaran 2018 pagu secara keseluruhan unit organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 182.367.646.000,- ( Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah ).

Selama periode berjalan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan melakukan satu (1) kali revisi DIPA ke DJPB Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Oktober 2018. Revisi tersebut merupakan:

1. Pemutakhiran data POK karena adanya kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi dananya tidak tersedia dalam DIPA, ataupun dana yang tersedia dalam DIPA tidak mencukupi kebutuhan sehingga harus direvisi. Selain itu, revisi juga banyak terjadi pada akun perjalanan dinas yang semula dari perjalanan dinas paket meeting menjadi perjalanan biasa, ataupun sebaliknya. Alasan perubahan perjalanan dinas tersebut adalah biaya perjalanan dinas biasa ataupun biaya perjalanan dinas paket keeting untuk keperluan ke pusat tidak mencukupi kebutuhan.
2. Revisi halaman 3 DIPA untuk menyesuaikan dengan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang telah *di update*, disesuaikan dengan penarikan.
3. Revisi Gaji dan Tunjangan untuk menutupi pagu minus belanja pegawai di Bulan Oktober, yaitu di akun beban tunjangan suami/istri PNS (511121) dan beban tunjangan fungsional PNS (511124). Sedangkan sisanya dialihkan ke akun beban gaji pokok PNS (511111) , beban pembulatan gaji PNS (511119), beban tunjangan struktural PNS (511123), beban tunjangan anak PNS (511122), dan beban tunjangan beras PNS (511126). Karena berdasarkan perhitungan bendahara gaji, kemungkinan terdapat pagu minus belanja pegawai di akun tersebut pada saat pembayaran gaji bulan November dan Desember 2018.

Total pagu akhir tidak terdapat perbedaan dengan pagu awal yaitu sebesar Rp.182.367.646.000,- ( Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah )

## **2. Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.**

Dari hasil pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 110.848.391.146,- (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau 60,78%, dengan realisasi belanja pegawai Rp. 66.523.589.152, (Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga

Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau 79,80%, belanja barang Rp. 42.678.385.980,- (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 43,91% dan belanja modal Rp. 1.646.416.014,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Empat Belas rupiah) atau 91,10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertanggung jawaban anggaran dan keuangan.

Adapun Capaian Realisasi Anggaran per output dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

**Tabel 1.4. Realisasi Anggaran per Output Tahun 2018**

NO	KODE	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5297,001	Dukungan Manajemen Tugas Teknis di Provinsi	4.788.325.000	4.389.031.133	91,66
2	5297,994	Layanan Perkantoran	84.956.943.000	67.981.032.278	80,02
3	5298,001	Pengawasan Intern yang Efektif Efisien Terhadap Pengelolaan Program KKBPK	180.000.000	160.134.000	88,96
4	5299,001	Pendidikan dan Pelatihan Program KKBPK di Provinsi	3.187.502.000	2.888.594.685	90,62
5	5299,002	Penelitian dan Pengembangan Program KKBPK di Provinsi	1.586.000.000	1.592.151.364	100,39
6	3331,075	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3.218.550.000	3.123.229.894	97,04
7	3331,076	Kesertaan ber-KB Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KBKR yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	11.286.400.000	6.688.732.190	59,26
8	3331,077	Pembinaan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah	4.324.300.000	4.177.927.194	96,62
9	3331,078	Penggerakan Stakeholder Mitra Kerja Serta Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat Berdasarkan Data dan Informasi yang Berbasis IT dalam Program KKBPK	10.662.408.000	8.008.344.088	75,11
10	3331,079	Peningkatan Penggerakkan KB MKJP	12.918.000.000	4.109.710.000	31,81
11	3331,080	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	32.277.718.000	3.432.226.720	10,63
12	3331,081	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	872.000.000	856.591.100	98,23
13	3331,082	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang Memiliki Lansia Melalui BKL	231.500.000	230.482.500	99,56
14	3331,083	Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD	9.708.000.000	1.366.200.000	14,07
15	3331,084	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	2.170.000.000	1.844.004.000	84,98
JUMLAH .....			182.367.646.000	110.848.391.146	60,78

Realisasi anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan masih di bawah realisasi secara Nasional. Realisasi Nasional sebesar 75, 11 % sedangkan realisasi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 60,78 %. Hal ini disebabkan oleh :

- OPDKB Kabupaten/Kota memiliki dana APBD sehingga mendahulukan realisasi dana APBD masing-masing.
- Persyaratan berkas klaim yang semakin banyak (KTP/KK) serta adanya batasan waktu pengajuan pencairan dana (maksimal 2 bulan setelah tanggal pelayanan) sehingga petugas lapangan kesulitan mengumpulkan berkas di lapangan.
- Pengadaan Implant tidak tayang e-catalog, tidak ada ULP serta terbatasnya waktu untuk pelaksanaan lelang. Selain itu, Stock implant s.d Desember 2018 cukup.
- Untuk output peningkatan penggerakan & pembinaan program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD, tidak terdapat juknis yang baru (yang ada hanya tahun 2013) dan terdapat kekhawatiran didalam penggunaan dana tersebut yang hampir sama dengan dana BOKB.
- Untuk output peningkatan pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB, waktu pelaksanaan tidak memungkinkan dan sangat singkat karena banyak kegiatan lainnya yang dilakukan di lapangan antara lain Pembentukan Kampung KB, Monev Kampung KB, Monev Lini Lapangan dan Pembinaan Kinerja PLKB.

### **3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung penurunan TFR dari 2,37 anak pada tahun 2015 menjadi 2,33 anak pada akhir tahun 2017.

DAK Sub Bidang KB yang merupakan bantuan kepada Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria dan persyaratan penerima DAK Sub Bidang KB, untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan KB

Nasional yang sudah merupakan urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota.

Tujuan DAK Sub Bidang KB adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui : (1) peningkatan mobilitas dan kapasitas tenaga PKB/PLKB dan KA. UPT dalam pembinaan dan penyuluhan KB; (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga Pra Sejahtera I (keluarga miskin); (3) Intensifikasi Advokasi dan KIE program KKBPk serta Generasi Berencana dalam menurunkan ASFR 15-19 th; (4) Peningkatan sarana prasarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; (5) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; (6) Pembangunan Gudang Alokasi; (7) Pembangunan Balai Penyuluhan Program Kependudukan dan KB; (8) Penyediaan sarana pengolahan data dan informasi guna mendukung pelayanan dan pelaporan; (9) Penyediaan sarana transportasi pengangkut peserta KB dan (10) Penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alkon.

Untuk Tahun 2018 jumlah penerima Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB adalah 16 Kabupaten dan Kota dengan total dana Rp. 16.985.000.000,- Jika dibandingkan DAK Tahun 2017 dengan total dana Rp. 17.744.946.925,- terjadi penurunan sebesar Rp. 759.946.925,- atau 4,28%.

Secara rinci pembagian porsi DAK per Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut :

**Tabel 1.5. Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 & 2018**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>TH. 2017</b>		<b>TH. 2018</b>	
1	OKI	Rp	1.041.000.000	Rp	1.044.000.000
2	Musi Rawas	Rp	961.000.000	Rp	1.622.000.000
3	Lubuk Linggau	Rp	1.045.266.925	Rp	790.000.000
4	Banyuasin	Rp	1.044.200.000	Rp	-
5	Ogan Ilir	Rp	1.042.700.000	Rp	1.470.000.000
6	OKU Selatan	Rp	963.250.000	Rp	841.000.000
7	OKU Timur	Rp	1.079.000.000	Rp	1.041.000.000
8	Muara Enim	Rp	1.242.000.000	Rp	145.000.000
9	Prabumulih	Rp	1.065.530.000	Rp	1.331.000.000
10	Empat Lawang	Rp	1.084.000.000	Rp	895.000.000
11	Palembang	Rp	1.039.000.000	Rp	1.189.000.000
12	Lahat	Rp	1.027.500.000	Rp	994.000.000
13	Pagar Alam	Rp	872.000.000	Rp	885.000.000
14	PALI	Rp	1.074.000.000	Rp	741.000.000
15	Musi Rawas Utara	Rp	1.089.000.000	Rp	1.787.000.000
16	Ogan Komering Ulu	Rp	1.036.500.000	Rp	596.000.000
17	Musi Banyuasin	Rp	1.039.000.000	Rp	1.614.000.000
	Sumsel	Rp	17.744.946.925	Rp	16.985.000.000

Menu DAK Sub Bidang KB Tahun 2018 terdiri dari : Obgyn Bed, IUD Kit, Implant Removal Kit, Tempat Penyimpanan Alokon dan/atau Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi, Pembangunan/Alih Fungsi Bangunan Gudang Alokon, Kendaraan Distribusi Alokon, Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB, Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB, Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), KIE Kit, Generasi Berencana (GenRe) Kit, Bina Keluarga Balita Kit, Bina Keluarga Lansia Kit, Pengadaan Personal Computer (PC), Pengadaan Laptop, Pengadaan Proyektor Liquid Crystal Display LCD dan Layar untuk Balai Penyuluh KB, Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan, Pengadaan Sarana Kerja Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB, Smartphone, Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD, Pengadaan Sepeda Motor Bagi Petugas KKBPK di Lini Lapangan.

Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6. Realisasi Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	OKI	Rp 1.044.000.000	Rp 833.671.990	79,85
2	Musi Rawas	Rp 1.622.000.000	Rp 1.327.941.000	81,87
3	Lubuk Linggau	Rp 790.000.000	Rp 658.750.000	83,39
4	Banyuasin	Rp -	Rp -	0,00
5	Ogan Ilir	Rp 1.470.000.000	Rp 697.053.450	47,42
6	OKU Selatan	Rp 841.000.000	Rp 790.410.000	93,98
7	OKU Timur	Rp 1.041.000.000	Rp 992.175.000	95,31
8	Muara Enim	Rp 145.000.000	Rp 144.540.000	99,68
9	Prabumulih	Rp 1.331.000.000	Rp 1.245.224.900	93,56
10	Empat Lawang	Rp 895.000.000	Rp 802.780.000	89,70
11	Palembang	Rp 1.189.000.000	Rp 781.139.125	65,70
12	Lahat	Rp 994.000.000	Rp 972.000.000	97,79
13	Pagar Alam	Rp 885.000.000	Rp 866.018.000	97,86
14	PALI	Rp 741.000.000	Rp 737.000.000	99,46
15	Musi Rawas Utara	Rp 1.787.000.000	Rp 1.575.300.000	88,15
16	Ogan Komering Ulu	Rp 596.000.000	Rp 524.511.184	88,01
17	Musi Banyuasin	Rp 1.614.000.000	Rp 1.607.600.000	99,60
	Sumsel	Rp 16.985.000.000	Rp 14.556.114.649	85,70

#### **4. DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)**

BOKB merupakan bantuan kepada Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria dan persyaratan penerima BOKB, untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional yang sudah merupakan urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota.

**Tujuan BOKB adalah :**

- a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional;
- b. Menyediakan dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota ke

setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN;

- c. Menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB;
- d. Menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD);
- e. Menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

Penggunaan Dana BOKB yang merupakan belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat, yang terdiri dari :

Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu urutan prioritas kegiatan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional penyuluhan KB;
- b. Biaya operasional pengolahan data;
- c. Staf meeting/ rapat teknis;
- d. Alat Tulis Kantor untuk pembelian ATK, penggandaan, penjilidan dan/ atau fotocopy;
- e. Biaya langganan daya dan jasa;
- f. Biaya pemeliharaan dan pengamanan Balai Penyuluhan KB.

Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dapat digunakan untuk :

- a. Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transprot;
- b. Biaya jasa pengiriman/ ekspedisi;
- c. Biaya makan dan minum;
- d. Biaya pengepakan;
- e. Biaya bongkar dan/atau muat;

Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk :

- a. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB;
- b. Pertemuan forum masyawarah tingkat desa Kampung KB;
- c. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB;



d. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB. Untuk tahun 2018 jumlah penerima BOKB adalah 17 Kabupaten dan Kota dengan total dana Rp. 59.784.570.000,-

Secara rinci pembagian porsi BOKB per Kabupaten dan Kota dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7. Realisasi Dana BOKB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Ogan Komering Ilir	5.524.440.000	5.201.405.500	94,15
2	Musi Rawas	4.510.570.000	4.510.570.000	100,00
3	Lubuk Linggau	1.721.850.000	828.904.299	48,14
4	Banyuasin	5.659.740.000	5.659.740.000	100,00
5	Ogan Ilir	4.229.190.000	3.726.890.000	88,12
6	OKU Selatan	4.828.140.000	1.705.096.000	35,32
7	OKU Timur	5.770.290.000	3.285.899.917	56,95
8	Muara Enim	4.582.290.000	634.424.100	13,85
9	Prabumulih	1.229.050.000	936.636.073	76,21
10	Empat Lawang	2.905.890.000	2.538.378.000	87,35
11	Palembang	2.797.650.000	2.661.108.609	95,12
12	Lahat	5.765.340.000	5.337.190.750	92,57
13	Pagar Alam	962.190.000	783.612.250	81,44
14	Panukal Abab Lematang Ilir	1.437.390.000	1.349.570.360	93,89
15	Musi Rawas Utara	1.910.170.000	1.252.729.000	65,58
16	Musi Banyuasin	3.567.540.000	3.537.693.935	99,16
17	Ogan Komering Ulu	2.382.840.000	744.917.000	31,26
Sumsel		59.784.570.000	44.694.765.793	74,76

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 ini merupakan laporan yang disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Provinsi Program KKB Nasional secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2018.

Secara umum, pencapaian indikator Program Kependudukan dan Keluarga di Sumatera Selatan baik *output* maupun *outcome* telah dapat dicapai dengan baik. Bahkan pencapaian beberapa indikator Kontrak Kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan diatas 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar 60,7%.

Namun demikian perubahan lingkungan strategis yang terus bergulir seiring dengan era desentralisasi ikut mempengaruhi eksistensi pengelolaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana terutama di tingkat lini lapangan. Oleh karena itu untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah:

1. Integrasi parameter kependudukan dan KB dalam perencanaan pembangunan (RPJMD) adalah suatu hal yang urgen untuk dilakukan saat ini, karena penduduk adalah titik sentral pembangunan, baik sebagai subyek/pelaku maupun obyek/sasaran pembangunan. Pembangunan kependudukan sebenarnya adalah suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas penduduk suatu bangsa untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya.
2. Perlu dilakukan pementapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional.

3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KKB dan program pemberdayaan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin, berpendidikan rendah, di daerah terpencil, serta keluarga penduduk rentan lainnya.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya KIE terhadap pembentukan kelompok-kelompok dan kegiatan PIK Remaja mengingat sasaran remaja sangat besar jumlahnya, sehingga dapat lebih berdampak pada peningkatan median usia kawin pertama mereka.
5. Pencapaian Peserta KB Aktif hendaknya bukan hanya sekedar mencapai target, tetapi juga diperlukan upaya-upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi, sehingga kenaikan Peserta KB Aktif diiringi dengan peningkatan Peserta KB Baru. Perlunya penekanan kembali kebijakan peningkatan sasaran PA MKJP yang tenaga pelayanannya telah dilatih, serta peningkatan strategi operasional percepatan untuk pencapaian sasaran PA Pria.
6. Peningkatan Pelayanan KB, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga melalui Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, Pembinaan Remaja melalui KIP/Konseling Kepada Remaja di Kampung KB.
7. Perlu upaya-upaya untuk meminimalkan kasus kegagalan dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi melalui peningkatan kualitas pelayanan medis teknis Program KB Nasional.
8. Sebagai bagian dari upaya pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, masih diperlukan penyediaan data dan informasi dari kabupaten/kota secara lengkap, benar, cepat, akurat dan tepat waktu, guna memantau pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dan mengoptimalkan dengan sarana IT yang telah di fasilitasi di 17 Kabupaten/Kota SKPD-KB.

**Palembang, Januari 2019**

**Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi Sumatera Selatan,**



**Drs. Waspi**

**NIP. 19591011 199203 1 001**



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIAN	KETERANGAN
<b>A SASARAN STRATEGIS</b>						
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,22	2,3	SKAP 2018
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive)	66,70	77,89	Statistik Rutin
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian	25,00	27,00	SDKI 2017
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,00	10,00	SKAP 2018
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	16,88	31,83	Statistik Rutin
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	23.955	24.433	Statistik Rutin
<b>B SASARAN PROGRAM</b>						
7	Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	7	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	51	72	SDKI 2017
8	Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	9,45	10,4	SKAP 2018
9	Meningkatnya median usia kawin pertama	9	Median usia kawin pertama wanita	20,8	21,31	SDKI 2017
10	Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan	10	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	52,20	50,6	SKAP 2018
11	Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi	11	Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi (semua alat/cara)	47,80	99,7	SDKI 2017
12	Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	12	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung	20,00	40,00	BID. DALDUK
<b>C INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA</b>						
13	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	13	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	55,1	51,5	RPJMN 2017
14	Terbentuknya Kampung KB	14	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	217	186	BID. ADPIN
15	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	15	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA)	25,00	7,53	BID. ADPIN
16	Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak	16	Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari	11,66	19,7	BID. KSPK
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	17	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 ( Skor: 2,7)		
18	Meningkatnya pencapaian kinerja	18	Persentase capaian kinerja	≥ 90	79,24	SEKRETARIAT
19	Meningkatnya pencapaian output	19	Persentase pencapaian output	≥ 95	87,00	SEKRETARIAT
20	Meningkatnya penyerapan anggaran	20	Persentase penyerapan anggaran	≥ 95	60,73	SEKRETARIAT
21	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	21	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	88,05	SEKRETARIAT